



**14<sup>th</sup> BALI DEMOCRACY FORUM**  
Nusa Dua, Bali, 9 December 2021

## **PERNYATAAN PERS**

**Y.M. RETNO L.P. MARSUDI**  
**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
DALAM RANGKA  
*BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) KE-14*  
NUSA DUA, 9 DESEMBER 2021

---

*Selamat pagi.*

*Salam sejahtera untuk kita semua.*

*Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.*

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Rekans media ysh,

Baru saja saya membuka *Bali Democracy Forum (BDF)* ke-14 yang diselenggarakan secara hibrid.

Sebagaimana rekan-rekan ketahui, ini adalah tahun kedua BDF dilangsungkan secara hibrid karena pandemi.

BDF tahun ini mengangkat tema "*Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic*".

Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan kelanjutandari tema BDF sebelumnya, yaitu "*Democracy and Covid-19 Pandemic*".

BDF kali ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan 4 Organisasi Internasional yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

Turut berpartisipasi pula Sekjen PBB António Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri/wakil menteri, antara lain Menlu AS Antony Blinken, Menlu RRT Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta dan lain sebagainya.

Tahun ini BDF dibuat lebih interaktif dengan meminta pandangan para ahli di bidangnya selain tentunya pandangan para menteri, termasuk di antaranya ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz.

Dalam sambutannya, Sekjen PBB menyampaikan bahwa *recovery for all depends on equality for all*.

Pandemi Covid-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negaramaju dan negara berkembang.

Sebagai komunitas global, kita semua harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan. Antara lain melalui peringanan hutang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan bagi semua.

Equality atau kesetaraan tidak hanya menjadi ruh dari demokrasi, tapi juga sebagai mesin penggerak bagi upaya pemulihan. *Equality is an engine for recovery*.

Dalam sambutan pembuka tadi, saya menyampaikan bahwa saat ini, meskipun masih sangat rentan, dunia sudah mulai beranjak pulih dari pandemi.

- ➔ Ekonomi global diperkirakan tumbuh 5,9% tahun ini.
- ➔ Banyak negara telah melonggarkan kebijakan pengetatan.
- ➔ Namun banyak juga negara yang melakukan pengetatan secarasementara karena munculnya varian baru *Omicron*.

Mindset kita telah berubah dari bertahan menjadi pemulihan *from survival to recovery*.

Saya sampaikan bahwa pandemi ini datang pada saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran.

Menurut laporan *Freedom House* tahun 2021, kebebasan global menurun dalam 15 tahun terakhir dan 75% penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu.

Pandemi semakin memperburuk kemunduran demokrasi tersebut karena telah memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalankan pemerintahan.

Dan kita harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi.

Kita lihat sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi.

Saya menegaskan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi adalah negara-negara demokrasi.

Rekan-rekan media ysh,

Dalam sambutan tadi saya juga menekankan pentingnya kita terus menjalankan demokrasi di masa pemulihan.

Dalam kaitan ini saya sampaikan tiga hal dalam *keynote speech* saya.

**Pertama**, kita harus memegang teguh prinsip kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang cepat.

Dalam demokrasi, kesetaraan adalah soal *fairness*.

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk menang melawan pandemi Covid-19.

Untuk itu, kita harus memastikan akses vaksin yang setara bagi semua.

Jurang kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat lebar. 64,94% Popoulasi negara kaya telah divaksinasi setidaknya dengan 1 dosis sementara di negara berpendapatan rendah baru 8,06%.

Ini tentunya tidak dapat dibiarkan.

Kita harus mendemokratisasikan distribusi vaksin ke semua negara utamanya yang penduduknya belum menerima dosis pertama.

Saya sampaikan pengalaman Indonesia di mana kita memastikan seluruh rakyat memiliki akses setera terhadap vaksin.

Hingga hari ini kita telah memvaksinasi lebih dari 142 juta orang dan hampir memenuhi target vaksinasi 40% populasi pada akhir tahun 2021 sebagaimana ditetapkan WHO.

Pada level global kita juga berkontribusi mendorong kesetaraan vaksin, antara lain dengan menjadi *Co-Chair COVAX AMC Engagement Group*.

Isu penguatan arsitektur kesehatan global ini juga diangkat oleh Indonesia selama presidensi G20 guna memastikan semua negara dapat mengatasi pandemi di masa depan.

Hal **kedua** yang saya sampaikan adalah penekanan saya bahwa kita harus mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua.

Dalam demokrasi, inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintah.

Tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi

harus kita dengarkan sesuai dengan semangat demokrasi.

Pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utamanya mereka yang paling rentan dan paling terdampak oleh pandemi, seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal.

Demokrasi akan memberi ruang dialog untuk memastikan proses pemulihan yang menyoal tantangan-tantangan spesifik yang mereka hadapi.

Saya juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga yang terdampak pandemi, seperti:

- ➔ Bantuan sembako kepada 28,8 juta orang
- ➔ Bantuan tunai kepada 9,9 juta keluarga
- ➔ Dan bantuan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga.

Hal **ketiga** yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus mewujudkan arsitektur ekonomi global yang adil untuk mempercepat pemulihan.

Dalam demokrasi, keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran.

Artinya, setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih.

Laporan dari PBB dan berbagai lembaga keuangan internasional memperingatkan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar-negara.

Sekitar 90% negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan perkapita pra-pandemi di tahun 2022. Sementara negara-negara berkembang dan LDCs akan memerlukan waktu jauh lebih lama.

Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik.

Sayangnya, norma dan aturan ekonomi internasional saat ini kita lihat masih kurang demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya. Saya berikan contoh, tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya.

Rekan-rekan media ysh,

Di akhir sambutan saya menekankan bahwa demokrasi adalah katalis untuk terjadinya perubahan yang positif dan kita memerlukan demokrasi untuk pulih dari pandemi.

BDF diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling belajar tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan dapat membantu kita pulih, *to recover together and recover stronger*.

Dalam rangkaian penyelenggaraan BDF ke-14 tahun ini, secara terpisah telah diselenggarakan pula berbagai kegiatan "*Road to BDF*", yang berlangsung pada Oktober-November lalu.

- ➔ Diskusi *Road to BDF* pertemuan Pilar Ekonomi sebagai *Business Community Forum*, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari 34 negara;
- ➔ Sementara untuk pilar masyarakat sipil dan media, pertemuan *Bali Civil Society and Media Forum* (BCSMF) dihadiri 340 peserta dari 7 negara;
- ➔ Untuk pilar pemuda, *Bali Democracy Students Conference* (BDSC), dihadiri oleh 137 pemuda dari 24 negara.

Itulah yang dapat saya sampaikan rekan-rekan.

Siang ini saya akan kembali ke Jakarta untuk nanti malam mendampingi Presiden RI berpartisipasi secara virtual dalam *Summit for Democracy* yang dituanrumahi oleh Presiden Joe Biden.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan terus jaga kesehatan.

\*\*\*

